

## **ABSTRAK**

Nama : Nur Azizah

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian

Judul : **Peran Pengawasan dan Pengendalian Aparatur BKN Terhadap Kasus Perpindahan Status Penyuluhan Keluarga Berencana Dalam Upaya Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten X**

Tujuan penulisan ini adalah (1) mendeskripsikan proses alih status Penyuluh KB; dan (2) menganalisis peran pengawasan dan pengendalian BKN atas kasus alih status Penyuluh KB. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Pengajuan daftar nominatif PNS Daerah Kabupaten/Kota kepada BKN. Kepala BKN menetapkan keputusan pengalihan PNS. Proses dan alur mengacu pada Perka BKN Nomor 6 Tahun 2016 mengenai pelaksanaan pengalihan PNS. Berdasarkan hasil analisis, Wasdal BKN memiliki peran cukup besar dalam upaya implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peran tersebut adalah : (1) Melakukan audit investigasi terhadap permasalahan PNS yang tidak mengikuti aturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; dan (2) memberikan bimbingan teknis kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

### **Kata Kunci:**

Alih Status PNS, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Penyuluh KB

## **ABSTRACT**

*Name : Nur Azizah*

*Study Program : Public Administration Science Field of Interest in Administration and Personnel Management*

*Title : The Role of Supervision and Control of BKN Apparatus on Cases of Transfer of Family Planning Counseling Status in Efforts to Implement Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government in District X*

*The purpose of this paper is (1) to describe the process of transferring the status of KB extension agents; and (2) analyzing the role of supervision and control of BKN in cases of transfer of family planning extension status. Data collection was carried out by observation and interview methods. Submission of the nominative list of District / City Regional Civil Servants to BKN. The Head of BKN determines the decision to transfer PNS. The process and flow refer to Perka BKN Number 6 of 2016 regarding the implementation of the transfer of civil servants. Based on the results of the analysis, Wasdal BKN has a significant role in the effort to implement Law Number 23 of 2014. These roles are: (1) Conducting investigative audits of civil servant problems that do not follow the rules in Law Number 23 Year 2014; and (2) provide technical guidance to PPK (Civil Service Officer).*

**Keywords:**

*Transfer of Civil Servant Status, Law Number 23 Year 2014, Family Planning Extension*